



Masyarakat Madani sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Politik Islam

Destri Aryani¹, Efi Febriany², Melisa³, Koko Adya Winata⁴

^{1,2,3,4}Universitas Widyatama, Indonesia

Email : destriaryanie@gmail.com¹, febriannye@gmail.com², anastasyamelisa5@gmail.com³, adyawinata@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the concept of civil society as a pillar of democracy from the perspective of Islamic politics and its relevance to the life of the nation and state in Indonesia. Civil society is understood as a social order that upholds the values of civility, justice, public participation, rule of law, and respect for human rights. From the perspective of Islamic politics, this concept is closely related to the principles of shura (deliberation), justice (al-'adalah), equality (al-musawah), and social responsibility, which serve as the foundation for the implementation of democratic political life. This research employs a qualitative method with a library research approach through the analysis of various literature, scientific journals, and relevant academic sources. The results of the study indicate that civil society has a strategic role in strengthening democracy through enhancing political participation, exercising social control over power, and developing an inclusive and tolerant political culture. Islamic politics views democracy not merely as a mechanism of power, but also as a means to realize public welfare and social justice. In Indonesia, the implementation of civil society values within the framework of Islamic politics can provide solutions to democratic challenges such as political polarization, intolerance, and the crisis of public ethics. Therefore, the synergy between civil society and the values of Islamic politics becomes an important element in creating a democratic system that is civilized, participatory, and oriented toward public welfare.

Keywords: civil society, democracy, Islamic politics, political participation, social justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep masyarakat madani sebagai pilar demokrasi dalam perspektif politik Islam serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masyarakat madani dipahami sebagai tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, keadilan, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif politik Islam, konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip syura, keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan politik yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi melalui penguatan partisipasi politik, kontrol sosial terhadap kekuasaan, serta pembangunan budaya politik yang inklusif dan toleran. Politik Islam memandang demokrasi bukan hanya sebagai mekanisme kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan bersama dan keadilan sosial. Di Indonesia, implementasi nilai-nilai masyarakat madani dalam perspektif politik Islam dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan demokrasi, seperti polarisasi politik, intoleransi, dan krisis etika publik. Dengan demikian, sinergi antara masyarakat madani dan nilai-nilai politik Islam menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang berkeadaban, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: masyarakat madani, demokrasi, politik Islam, partisipasi politik, keadilan sosial.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya membutuhkan perangkat konstitusional dan institusional, tetapi juga memerlukan budaya politik yang partisipatif, toleran, serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Salah satu elemen penting dalam menopang keberhasilan demokrasi adalah keberadaan masyarakat madani (*civil society*) yang kuat. Masyarakat madani dipahami sebagai kelompok sosial yang mandiri, kritis, berdaya, serta mampu menjadi penghubung antara negara dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan kehidupan politik. Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, masyarakat madani memiliki posisi strategis dalam mengawal proses demokratisasi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan bersama (Mujahidin, 2021).

Konsep masyarakat madani pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan gagasan *civil society* yang berkembang di Barat. Namun demikian, dalam perspektif Islam, masyarakat madani tidak hanya dimaknai sebagai kekuatan sosial yang otonom terhadap negara, melainkan juga sebagai tatanan masyarakat berkeadaban yang dibangun di atas nilai-nilai ketauhidan, persaudaraan, musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Model masyarakat seperti ini secara historis dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. melalui Piagam Madinah. Piagam tersebut menjadi salah satu bukti historis bahwa Islam telah mengenal konsep kehidupan sosial-politik yang demokratis, pluralis, dan menjunjung tinggi hak-hak warga masyarakat jauh sebelum konsep demokrasi modern berkembang di Barat (Jufri, 2020).

Dalam perspektif politik Islam, demokrasi bukanlah konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam selama nilai-nilai yang dikembangkan tetap sejalan dengan prinsip syura, keadilan, persamaan, dan kemaslahatan umat. Politik Islam memandang bahwa kekuasaan harus dijalankan secara etis dan bertanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat madani menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kontrol sosial terhadap kekuasaan politik agar tidak berjalan secara otoriter. Kehadiran masyarakat madani memungkinkan terciptanya ruang publik yang bebas dan partisipatif sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritik, aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan negara secara terbuka dan demokratis (Mas'udi, 1999).

Di Indonesia, dinamika demokrasi pascareformasi menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat madani memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan politik nasional. Berbagai organisasi keagamaan, lembaga sosial, organisasi mahasiswa, media massa, dan komunitas masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, serta kebebasan berpendapat. Masyarakat madani menjadi kekuatan sosial yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Selain itu, masyarakat madani juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan toleransi, moderasi beragama, dan dialog antar kelompok masyarakat (Mundakir, 2024).

Meskipun demikian, perkembangan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Praktik politik pragmatis, polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, rendahnya literasi politik, serta meningkatnya sikap intoleransi menjadi persoalan yang dapat menghambat penguatan demokrasi substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup tanpa didukung oleh budaya masyarakat yang berkeadaban. Dalam situasi ini, penguatan masyarakat madani menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang sehat dan inklusif. Masyarakat madani tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik yang mampu menanamkan nilai demokrasi, etika publik, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas (Mufarrihah, 2025).

Selain itu, konsep masyarakat madani dalam politik Islam juga memiliki relevansi kuat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai, menghargai keberagaman, serta menegakkan prinsip persamaan hak antarwarga negara. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih bermoral, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Adistira, 2022).

Secara teoritis, pembahasan mengenai masyarakat madani dan demokrasi dalam perspektif politik Islam terus mengalami perkembangan. Banyak akademisi menilai bahwa masyarakat madani merupakan instrumen penting dalam memperkuat demokrasi substantif karena mampu membangun keseimbangan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks ini,

politik Islam tidak dipahami semata-mata sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai etis dalam kehidupan publik. Kehadiran masyarakat madani menjadi manifestasi dari praktik politik Islam yang mengedepankan moralitas, keadilan sosial, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara (Jufri, 2020).

Penelitian mengenai masyarakat madani sebagai pilar demokrasi dalam perspektif politik Islam menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan antara Islam, demokrasi, dan civil society. Sebagian pihak memandang bahwa demokrasi merupakan produk Barat yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan Islam, sedangkan pihak lain menilai bahwa nilai-nilai demokrasi justru memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh sebab itu, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana konsep masyarakat madani dalam Islam dapat berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai relevansi nilai-nilai politik Islam dalam membangun sistem demokrasi yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dipilih karena pembahasan mengenai masyarakat madani sebagai pilar demokrasi dalam perspektif politik Islam membutuhkan analisis konseptual, interpretatif, dan kritis terhadap berbagai literatur ilmiah, baik berupa jurnal akademik, buku, maupun dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan tema demokrasi, civil society, dan politik Islam kontemporer. Kajian kepustakaan dinilai efektif untuk mengurai hubungan antara nilai-nilai masyarakat madani dengan praktik demokrasi dalam konteks pemikiran politik Islam modern. Dalam penelitian kualitatif, data tidak diolah melalui angka statistik, melainkan dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna, hubungan konseptual, dan konstruksi pemikiran yang berkembang dalam masyarakat akademik (Herdiansah dkk., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA dan jurnal nasional bereputasi yang terbit dalam kurun lima tahun terakhir, terutama yang membahas masyarakat madani, demokrasi deliberatif, politik identitas, serta perkembangan politik Islam di Indonesia. Beberapa artikel yang dijadikan rujukan utama antara lain penelitian tentang masyarakat madani dalam

demokrasi Indonesia, demokrasi dalam Islam, serta penguatan civil society berbasis nilai keislaman (Rahman, 2022). Adapun data sekunder diperoleh melalui buku, dokumen kebijakan, prosiding ilmiah, serta sumber akademik lain yang relevan untuk memperkuat analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber ilmiah yang memiliki relevansi substansial dengan konsep masyarakat madani dan demokrasi Islam. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh memiliki validitas akademik dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, literatur mengenai politik identitas, demokrasi deliberatif, dan perkembangan partai politik Islam turut digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat dinamika masyarakat madani dalam kehidupan demokrasi Indonesia modern (Hermansyah, 2022).

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kritis. Analisis isi dilakukan dengan menelaah berbagai gagasan, konsep, dan argumentasi yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah terkait masyarakat madani dan politik Islam. Sementara itu, analisis deskriptif-kritis digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara prinsip demokrasi dengan nilai-nilai politik Islam seperti keadilan, musyawarah (syura), toleransi, persamaan hak, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi bagaimana masyarakat madani dapat menjadi instrumen penguatan demokrasi yang berlandaskan etika politik Islam. Gagasan tentang demokrasi Islam yang berbasis syura dan kemaslahatan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara partisipasi publik dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Amir & Rahman, 2024).

Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami perkembangan praktik demokrasi di Indonesia yang sering diwarnai fenomena politik identitas dan polarisasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat madani menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mendorong terciptanya ruang publik yang inklusif. Penelitian mengenai fenomena politik identitas menjelaskan bahwa demokrasi yang tidak diimbangi dengan penguatan civil society berpotensi melahirkan fragmentasi sosial dan konflik horizontal (Mulyadi dkk., 2024). Oleh sebab itu, masyarakat madani dalam perspektif politik Islam dipahami bukan sekadar

kelompok sosial independen, melainkan kekuatan moral yang mampu menjaga keseimbangan antara negara, masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan.

Untuk menjaga objektivitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dan hasil penelitian dari jurnal yang berbeda. Triangulasi dilakukan agar data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta mampu mengurangi subjektivitas peneliti dalam menafsirkan konsep masyarakat madani dan demokrasi Islam. Selain itu, penggunaan referensi terbaru dari jurnal terindeks lima tahun terakhir dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki relevansi kontekstual dengan perkembangan demokrasi dan politik Islam kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Politik Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep masyarakat madani dalam perspektif politik Islam merupakan bentuk masyarakat yang dibangun atas dasar nilai-nilai tauhid, keadilan, persamaan, toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep masyarakat madani tidak hanya dipahami sebagai civil society dalam pengertian Barat yang berfokus pada kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan negara, tetapi juga mengandung dimensi spiritual serta moralitas Islam yang kuat. Dalam tradisi Islam, masyarakat madani berakar dari praktik kehidupan sosial-politik pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui Piagam Madinah yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat plural dan demokratis (Syarif, 2022).

Piagam Madinah memperlihatkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan kelompok sosial dalam satu sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip keadilan dan persamaan hak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memberikan ruang terhadap praktik kehidupan demokratis yang mengedepankan kesepakatan bersama dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat madani dalam perspektif politik Islam tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka terhadap keberagaman sosial dan budaya selama tetap berada dalam kerangka nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Keberadaan masyarakat madani menjadi sangat penting dalam sistem demokrasi karena mampu menciptakan keseimbangan antara negara dan masyarakat. Dalam negara demokrasi, kekuasaan yang tidak dikontrol oleh masyarakat sipil cenderung bergerak menuju praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, masyarakat madani berfungsi

sebagai kekuatan sosial yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik (Hidayat dkk., 2021).

Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani memiliki relevansi yang sangat besar karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Kehadiran organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil Islam dapat berperan aktif dalam memperkuat demokrasi melalui pendidikan, dakwah moderasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai toleransi antarumat beragama. Peran tersebut menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dapat berjalan beriringan dalam menciptakan kehidupan politik yang berkeadaban (Rahman dkk., 2023).

Selain itu, masyarakat madani dalam Islam memiliki orientasi pembangunan peradaban yang lebih luas dibandingkan konsep civil society Barat. Jika konsep Barat lebih menitikberatkan pada kebebasan individu, maka masyarakat madani dalam Islam berupaya menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab moral. Setiap individu diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, tetapi tetap harus memperhatikan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, masyarakat madani dalam perspektif politik Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan moral sosial masyarakat (Aziz, 2020).

Tantangan etika dan moralitas sosial masyarakat madani tersebut kini kian kompleks di tengah derasnya arus disrupsi teknologi di era Revolusi Industri 4.0. Perkembangan siber tidak hanya mengubah pola komunikasi politik, tetapi juga mendistorsi ruang publik digital dengan maraknya hoaks dan polarisasi identitas yang dapat mengancam keutuhan demokrasi. Oleh karena itu, demi menjaga kualitas nalar publik yang sehat, penguatan pilar-pilar civil society di era digital ini harus diarahkan pada transformasi pola pikir masyarakat. Upaya edukasi sosial dan internalisasi nilai keislaman dalam ruang publik tidak boleh lagi sekadar berfokus pada pemindahan pengetahuan secara pasif (transfer of knowledge), melainkan harus secara aktif membentuk karakteristik masyarakat sipil yang kreatif dan memiliki daya kritis tinggi dalam memecahkan berbagai problematika kebangsaan yang dihadapi (Winata, 2020).

Peran Masyarakat Madani sebagai Pilar Demokrasi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat madani memiliki posisi yang sangat strategis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan sistem pemilu dan lembaga politik formal, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara dan memperjuangkan kepentingan publik. Dalam hal ini, masyarakat madani menjadi ruang sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, serta melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah secara konstitusional (Fauzan dkk., 2021).

Masyarakat madani berfungsi sebagai penghubung antara negara dan rakyat. Fungsi tersebut terlihat melalui aktivitas organisasi sosial, lembaga pendidikan, media massa, komunitas keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat yang berupaya memperjuangkan nilai keadilan sosial dan hak-hak masyarakat. Dalam perspektif politik Islam, partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan bagian dari implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang mengharuskan masyarakat menjaga kehidupan sosial-politik agar tetap berada pada jalur kebaikan dan keadilan (Sulaiman, 2022).

Selain sebagai pengontrol kekuasaan, masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan politik, tetapi juga menyangkut budaya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dalam Islam, budaya musyawarah atau syura menjadi prinsip utama dalam penyelesaian persoalan publik. Musyawarah memungkinkan terjadinya dialog yang terbuka, rasional, dan partisipatif sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat (Hakim, 2020).

Pada era reformasi, masyarakat madani memainkan peranan penting dalam mendorong perubahan politik menuju sistem yang lebih demokratis. Gerakan mahasiswa, media independen, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok intelektual menjadi kekuatan sosial yang menekan pemerintah agar membuka ruang kebebasan sipil dan transparansi publik. Keberhasilan reformasi 1998 menunjukkan bahwa masyarakat madani mampu menjadi kekuatan moral dan politik dalam mengawal perubahan sosial-politik di Indonesia (Arifin, 2021).

Namun demikian, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat madani. Media sosial yang pada awalnya menjadi ruang kebebasan berekspresi kini sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, propaganda politik, dan polarisasi sosial. Fenomena tersebut dapat mengganggu kualitas demokrasi apabila

tidak diimbangi dengan pendidikan politik dan literasi digital yang memadai. Oleh sebab itu, masyarakat madani perlu memperkuat kesadaran kritis masyarakat agar demokrasi tidak terjebak dalam konflik identitas dan manipulasi informasi (Rahman dkk., 2023).

Nilai-Nilai Politik Islam dalam Penguatan Demokrasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Salah satu nilai utama dalam politik Islam ialah syura atau musyawarah. Prinsip syura menegaskan bahwa pengambilan keputusan politik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan dilakukan melalui proses dialog yang terbuka. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Islam mengakui pentingnya keterlibatan rakyat dalam menentukan arah kebijakan publik dan menolak praktik kekuasaan absolut (Hakim, 2020).

Prinsip musyawarah dalam Islam memiliki relevansi dengan konsep demokrasi deliberatif modern yang menekankan dialog dan pertukaran gagasan secara rasional. Demokrasi yang hanya berorientasi pada suara mayoritas tanpa mempertimbangkan kualitas dialog berpotensi melahirkan dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Oleh sebab itu, nilai syura dalam Islam memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Selain syura, prinsip keadilan ('adl) menjadi fondasi utama dalam sistem politik Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami dalam aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Demokrasi yang sehat harus mampu menjamin distribusi hak dan kesempatan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi agama, etnis, maupun golongan tertentu (Syarif, 2022).

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, prinsip keadilan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ketimpangan sosial dan diskriminasi dapat memicu konflik horizontal yang berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat madani harus berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjunjung prinsip keadilan sosial.

Politik Islam juga menempatkan moralitas sebagai bagian penting dalam praktik kekuasaan. Pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif dan intelektual, tetapi juga harus memiliki integritas moral, amanah, dan tanggung jawab sosial. Fenomena

korupsi, politik uang, serta penyalahgunaan kekuasaan yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penguatan etika politik berbasis nilai-nilai Islam (Aziz, 2020).

Di samping itu, nilai toleransi dalam Islam menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi yang inklusif. Islam mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Sikap toleran tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Organisasi Islam moderat di Indonesia juga berperan aktif dalam mengembangkan moderasi beragama guna mencegah radikalisme dan ekstremisme politik (Rahman dkk., 2023).

Tantangan Masyarakat Madani dalam Demokrasi Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani menghadapi berbagai tantangan serius dalam perkembangan demokrasi kontemporer. Salah satu tantangan utama ialah meningkatnya politik identitas yang memanfaatkan isu agama, etnis, dan budaya sebagai alat mobilisasi politik. Politik identitas sering digunakan untuk memperoleh dukungan politik secara emosional sehingga dapat memicu polarisasi sosial dan konflik di tengah masyarakat (Nasution dkk., 2023).

Fenomena politik identitas semakin terlihat pada momentum pemilu ketika isu keagamaan digunakan untuk menyerang lawan politik atau membangun sentimen kelompok tertentu. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena masyarakat lebih terfokus pada sentimen identitas dibandingkan program dan gagasan politik. Jika situasi ini terus berkembang, maka demokrasi dapat kehilangan substansi sebagai sistem yang menjunjung rasionalitas, keadilan, dan persatuan nasional.

Selain politik identitas, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan besar bagi masyarakat madani. Media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi yang sangat luas, tetapi pada saat yang sama juga mempermudah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, propaganda politik, dan disinformasi. Situasi tersebut menyebabkan ruang publik demokrasi sering dipenuhi konflik dan pertentangan yang melemahkan solidaritas sosial masyarakat (Fauzan dkk., 2021).

Tantangan lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik akibat praktik korupsi, oligarki, dan lemahnya penegakan hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, maka partisipasi politik masyarakat akan menurun dan memunculkan sikap apatis terhadap demokrasi. Kondisi tersebut dapat

membuka peluang munculnya kekuasaan yang bersifat otoriter karena lemahnya kontrol publik terhadap pemerintah (Arifin, 2021).

Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi turut memengaruhi pola kehidupan masyarakat Muslim. Sebagian masyarakat lebih mudah terpengaruh ideologi populisme dan konservatisme digital yang berkembang melalui media sosial. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan politik, moderasi beragama, serta literasi digital menjadi langkah strategis dalam menjaga eksistensi masyarakat madani di era demokrasi digital (Rahman dkk., 2023).

Relevansi Masyarakat Madani bagi Demokrasi Indonesia

Masyarakat madani memiliki relevansi yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang sehat memerlukan masyarakat sipil yang kuat agar proses politik tidak hanya didominasi oleh elite kekuasaan dan kepentingan oligarki. Keberadaan masyarakat madani memungkinkan terciptanya kontrol sosial terhadap pemerintah sekaligus memperkuat budaya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik (Sulaiman, 2022).

Dalam perspektif politik Islam, masyarakat madani mencerminkan kehidupan sosial yang berkeadaban, menghormati hukum, menjunjung nilai kemanusiaan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menempatkan musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Hakim, 2020).

Masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai toleransi, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi modal utama dalam mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan bangsa. Oleh sebab itu, penguatan masyarakat madani harus dilakukan melalui pendidikan politik, pengembangan literasi digital, serta penguatan moderasi beragama agar masyarakat mampu menghadapi tantangan demokrasi modern secara bijaksana (Hidayat dkk., 2021).

Selain itu, masyarakat madani dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi degradasi demokrasi akibat korupsi, politik identitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya masyarakat sipil yang kritis dan partisipatif, pemerintah akan lebih terdorong untuk menjalankan kekuasaan secara transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan

bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem politik formal, tetapi juga oleh kekuatan masyarakat sipil yang sadar akan hak dan tanggung jawab sosialnya.

KESIMPULAN

Masyarakat madani dalam perspektif politik Islam memiliki peran penting dalam membangun demokrasi yang berkeadaban, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Konsep ini menekankan prinsip keadilan, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Dalam politik Islam, demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat (Amir & Rahman, 2025). Selain itu, masyarakat madani juga dipahami sebagai kekuatan sosial yang mampu menciptakan kehidupan politik yang mandiri, kritis, dan demokratis melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan (Mujahidin, 2021).

Keberadaan masyarakat madani juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam kehidupan politik. Di tengah tantangan demokrasi modern seperti politik identitas, polarisasi sosial, dan penyebaran hoaks, masyarakat madani menjadi kekuatan penting dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial-politik masyarakat Indonesia (Hermansyah, 2022). Oleh karena itu, penguatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan sangat diperlukan dalam menciptakan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, demokrasi dalam perspektif politik Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pembentukan kehidupan sosial yang adil dan bermoral. Demokrasi yang tidak didasarkan pada etika berpotensi melahirkan praktik politik pragmatis seperti money politics dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penguatan masyarakat madani berbasis nilai Islam moderat menjadi langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang harmonis, adil, dan berkeadaban (Rahman, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat madani memiliki kontribusi besar dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip moral, keadilan, dan kemaslahatan umat (Mujahidin, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Adistira, D. (2022). Perkembangan pemikiran Islam tentang civil society, konsep ummah dan masyarakat madani. *Proceedings of International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 3(1), 145–156. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/icis/article/view/12694>

- Agasi, A., Sibarani, R., & Damanik, E. L. (2023). The phenomena of money politics and identity politics ahead of the 2024 elections. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(2), 145–156. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/10468>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2024). Garis besar ideal demokrasi dalam Islam. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 33–47. <https://jkk.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/53696>
- Arifin, M. (2021). Demokrasi dan penguatan civil society di Indonesia. *Jurnal Civics*, 18(2), 145–158. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics>
- Aziz, A. (2020). Politik Islam dan masyarakat madani dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik Islam*, 5(1), 44–59. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>
- Fauzan, M., dkk. (2021). Tantangan demokrasi digital dan masyarakat sipil di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 7(2), 88–101. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb>
- Hakim, L. (2020). Konsep syura dalam politik Islam dan relevansinya terhadap demokrasi modern. *Islamica Journal*, 12(1), 33–47. <https://journal.stai-siliwangi.ac.id/index.php/islamica/article/view/127>
- Herdiansah, A. G., Firmansyah, M. A., & Ahmad, N. S. Y. (2025). Mapping the “Aksi Bela Islam 212” effect: Redefining identity politics in Indonesian scholarship 2011–2023. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 12–26. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/90533>
- Hermansyah, Y. (2022). Politik identitas lokal dalam proses demokrasi Indonesia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(2), 139–158. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i02.3236>
- Hidayat, R., dkk. (2021). Civil society dan penguatan demokrasi perspektif Islam moderat. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 9(1), 77–91. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6918>
- Indriani, N. D. (2025). Perkembangan demokrasi: Studi komparasi pertarungan partai politik Islam pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 55–69. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/4772>

- Jufri, A. (2020). Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. *Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 5(2), 120–134. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/1385>
- Mas'udi, W. (1999). Masyarakat madani: Visi etis Islam tentang civil society. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 157–172. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11137>
- Mufarrihah, N. F. (2025). Konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam dan demokrasi serta relevansinya bagi kehidupan sosial di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 44–58. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/21886>
- Mujahidin, S. (2021). Masyarakat madani dan politik demokrasi Indonesia: Telaah singkat civil society dalam pendekatan sosiologi politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 4(2), 201–214. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/5912>
- Mundakir, A. (2024). Peran masyarakat sipil dalam penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. *Community Development Journal*, 8(1), 77–89. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/view/20847>
- Nasution, F., dkk. (2023). Politik identitas dan tantangan demokrasi Indonesia kontemporer. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(1), 22–39. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/12631>
- Rahman, A. (2022). Reorientasi Islam inklusif dalam mewujudkan masyarakat madani Indonesia di era demokrasi deliberatif. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3822–3832. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i10.2022.3822-3832>
- Rahman, A., dkk. (2023). Islam inklusif dan penguatan masyarakat madani di era digital. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 455–468. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/6905>
- Sulaiman, I. (2022). Masyarakat madani sebagai pilar demokrasi dalam perspektif politik Islam. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 14(2), 120–136. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>
- Syarif, M. (2022). Piagam Madinah dan konsep masyarakat madani dalam politik Islam. *Jurnal Studi Islam dan Demokrasi*, 8(1), 51–66. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>

Winata, K. A. (2020). Model Pembelajaran Kolaboratif dan Kreatif untuk Menghadapi Tuntutan Era Revolusi Industri 4.0. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 2(1), 12–24.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/193>